

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adrian Sutedi, Adrian. 2008. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan berbagai Permasalahannya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Arifin, Zainal. 2012. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsim. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Danial dan Wasriah. 2003. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Fadjar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, Lawrence M. *American Law an Introduction*, New York: W.W. Norton and Co.
- Harahap, Yahya. 2016. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kagramanto, L. Budi. 2008. *Larangan Persekongkolan Tender: Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Surabaya: Srikandi.
- Malik, Alfian. 2010. *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*. Yogyakarta : Andi Offse.
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Rokan, Mustafa Kamal. 2012. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siswanto, Arie. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta Selatan: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sitompul, Asril. 1999. *Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Putusan Pengadilan atau Lembaga :

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah Lainnya :

Center for Strategic and International Studies, *Tinjauan Kebijakan Ekonomi Indonesia*

Kagramanto, Budi L. 2007. *Implementasi UU No 5 Tahun 1999 Oleh KPPU*. Jurnal Ilmu Hukum Yustisia.

Kamal, Ubaidillah dan Abdullah Azzam. 2019. *Kajian Yuridis Praktek Persekongkolan dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Putusan KPPU Perkara Nomor 16/Kppu-I/2016)*. Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1.

- Kaysen, Kaysen and Donald F. Turner. 1971. *Antitrust Policy: an Economic and Legal Analysis*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hendrick, Ken, R. Preston McAfee, dan Michael A. Williams. “*Auctions and Bid Rigging*”. Department of Economics, University of Wisconsin-Madison. Madison.
- KPPU RI. *Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999*.
- _____. *Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender*.
- Lubis, Andi Fahmi dkk, 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Buku Ajar KPPU.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2009. *Pedoman untuk Mengatasi Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Publik*.
- Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. KPPU RI. 23 November.
- R. Shyam Khemani et.al. 1999. *A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy (Washington DC. And Paris: The World Bank and Organization for Economic Co-operation and Development=OECD*.
- Rachenjantono, Edy. 2008. *Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Jasa Konstruksi*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Satriawan, Rio dkk. 2015. *Analisis Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal GEMA. THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015, hlm. 1724.
- Siswanto, Ari. 2001. *Bid-Rigging Sebagai Tindakan Antipersaingan dalam Jasa Konstruksi*, Refleksi Hukum UKSW, Salatiga, April – Oktober.
- Zihaningrum, Apectriyas. 2016. *Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jurnal Privat Law Vol. IV No 1 Januari-Juni.

D. Skripsi dan Thesis :

Ganupama, Gadra. *Analisa Yuridis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui Proses Tender dan Penyimpangan atas Tender yang Berdampak pada Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Skripsi. (Semarang: Universitas Diponegoro. 2017).

Hafizd, Fachri. *Mekanisme Pengaturan Tender Rekonstruksi Jalan Nasional Provinsi Gorontalo (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11/KPPU-L/2015)*. Skripsi. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2017).

Hanafi, Rachman. *PerSe Illegal dan Rule of Reason dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Skripsi. (Surabaya: Universitas Airlangga. 2004).

Hendra, Verry. *Suatu Kajian Tentang Sosialisasi UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu-Lintas : Studi Deskriptif di Wilayah Hukum Polsek Majalay*. Skripsi. (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2012).

Mangiring, David Fransiskus. *Praktek Persekongkolan Tidak Sehat Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara. 2010).

Manihuruk, Sondang Irene Gresilya. *Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Tender Pengadaan Bus Trans Jakarta (Analisis Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2014 Tentang Tender Bus Trans Jakarta)*. Skripsi. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016).

Fitria, Maylen. *“Perbedaan Maknan tentang Praktek Diskriminasi dalam Persekongkolan Tender dan Penguasaan Pasar”*. Tesis. (Yogyakarta; Universitas islam Indonesia, 2016).

Wiboewo, Arry Bagoes. *Tantangan, Hambatan, dan Permasalahan yang Dihadapi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penegakkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Thesis. (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).

E. Situs Internet :

Angga Sukmawijaya, *PUPR Terima 193 Aduan Masyarakat, 85 Persen Soal Penyimpangan Proyek*, 2019
<https://kumparan.com/@kumparanbisnis/pupr-terima-193-aduan-masyarakat-85-persen-soal-penyimpangan-proyek-1rLW0jUIGIr>, diakses pada tanggal 17 Juli 2019 pukul 23.44 WIB.

Arryan, ” *Proyek Infrastruktur di Cimahi Mangkrak karena Pemerintah Salah Pilih Kontraktor?*”, 2017,
<https://bandung.pojoksatu.id/read/2017/11/26/proyek-infrastruktur-di-cimahi-mangkrak-karena-pemerintah-salah-pilih-kontraktor/>, diakses pada 16 Juli 2019 pukul 00.44 WIB.

BPKAD Kabupaten Banjar, *Permasalahan Strategi Perencanaan, Penganggaran, Dan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*, 2016,
<http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/08/30/permasalahan-strategi-perencanaan-penganggaran-dan-pengelolaan-barang-milik-negaradaerah/>, diakses pada 18 Juli 2019 pukul 09.31 WIB.

BPPKPD, *10 Poin Penting Perbedaan Perpres No. 16 Tahun 2018 dengan Perpres No. 54 Tahun 2010*, 2018,
<https://www.bppkpd.com/perpres-no-16-tahun-2018/>, diakses pada 02 Juli 2019 pukul 15.31 WIB.

Ditha Wiradiputra, *Mengkaji Efektifitas Implementasi Hukum Persaingan Usaha Terhadap Industri Ritel*,
http://staff.ui.ac.id/system/files/users/ditha.wiradiputra61/material/masuk_antertulisataskajianimplementasiuuno5pdbisnisritel.doc, diakses pada 11 Juli 2019 pukul 08.15 WIB.

Endang Mulyatiningsih, *Metode Pengumpulan Data*,
<http://staffnew.uny.ac.id/upload/131808329/pendidikan/METODE+PEN+GUMPULAN+DATA.pdf>, hlm.3, diakses pada 16 Juni 2019 pukul 19.14 WIB.

KBBI, <https://kbbi.web.id/saing> diakses pada 4 April 2019, pukul 07.35 WIB.

KBBI, <https://kbbi.web.id/tender> diakses pada 14 Maret 2019, pukul 19.12 WIB.

KPPU, <http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/tugas-dan-wewenang/>, diakses pada tanggal 5 April 2019, pukul 08.09 WIB.

KPPU, <http://www.kppu.go.id/id/produk-hukum/peraturan-kppu/>, diakses pada tanggal 21 Juni 2019 pukul 20.07 WIB.

KPPU, *Pedoman Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan UU. No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, [www.kppu.go.id/docs/guideline/guideline tender.pdf](http://www.kppu.go.id/docs/guideline/guideline_tender.pdf), diakses pada 30 Mei 2019 pukul 15.38 WIB.

LPSE, *Profil LPSE*, <https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/publik/tentangkami>, diakses pada 13 Juli 2019 pukul 15.01 WIB.

Michael Agustinus, *KPPU Usut 14 Perkara Persekongkolan Tender Proyek jalan di 2018*, 2019, <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/kppu-usut-14-perkara-persekon-gkolan-tender-proyek-jalan-di-2018-1546494364140280386>, diakses pada 16 Juli 2019 pukul 00.12 WIB.

Pengadaan(Eprocurement), 8 Poin Penting dalam UU Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017, 2017, <https://www.pengadaan.web.id/2016/12/8-poin-penting-dalam-uu-jasa-konstruksi-terbaru.html> , diakses pada 06 Juli 2019 pukul 15.15 WIB.

Pengadaan (*Eprocurement*), Jangan Ada Lagi Monopoli Pengadaan Barang/Jasa di Daerah, 2019, <https://www.pengadaan.web.id/2019/07/jangan-ada-lagi-monopoli-pengadaan-barang-jasa.html>, diakses pada 12 Juli 2019 pukul 22.35 WIB.

Ranyta Yusran, *Pentingnya prinsip "per se" dan "rule of reason" di UU Persaingan Usaha*, 2010, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4b94e6b8746a9/pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha>, diakses pada 30 Mei 2019 pukul 14.50 WIB

Sovia Hasanah, *Arti Alat Bukti Tidak Langsung*, 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a824ec03c369/arti-alat-bukti-tidak-langsung>, diakses pada 21 Agustus pukul 17.06 WIB

www.kppu.go.id/id/putusan/Tahun-2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018/ diakses pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 16.17 WIB.

F. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 jo. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persengkongkolan dalam Tender